



IMPLEMENTASI MASTER PLAN 1974-1994 TERHADAP PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG

IMPLEMENTATION OF MASTER PLAN 1974-1994 ON PALEMBANG CITY DEVELOPMENT

Sumiyati^a, Desi Rusmini^a, Syarifuddin^a, Supriyanto^a

^aPendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya; Indralaya

*Korespondensi: syarifuddin@fkip.unsri.ac.id

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 14 Desember 2020
- Artikel diterima: 26 Juni 2021
- Tersedia Online: 31 Maret 2022

ABSTRAK

Master plan 1974-1994 disusun oleh seorang arsitek di Kota Palembang, Ir. Anwar Arifai pada tahun 1971 yang saat itu menjabat sebagai kepala Dinas Tata Ruang Kota Palembang untuk ditugaskan dalam penyusunan master plan. Menurut pengamatan dan hasil di lapangan master plan 1974-1994 sembilan puluh persen terlaksana dengan berbagai proyek besar dan konkret salah satunya adalah pembangunan jalan lingkar, pembangunan pusat pemerintahan (civic center). Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis yang mempunyai langkah pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Tujuan penelitian ini adalah sebagai bahan kajian lebih dalam mengenai pembangunan di Kota Palembang di masa depan agar menjadi lebih terdefinisi lebih rinci juga sebagai bahan evaluasi instansi yang terkait dalam pembangunan Palembang. Maka tujuan pembangunan rencana induk digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan serta mengatur tata kota dan perluasan kota yang akan datang. Hal ini merupakan tindakan dari pada pemberian pernyataan konklusif visi dua sampai tiga dekade mendatang dengan mengingat pertumbuhan populasi yang akan datang, yang mengarah pada ekonomi yang harus berkembang, serta kebutuhan infrastruktur dan perbaikan ekologi diharapkan terjadi untuk area tertentu dengan adanya susunan tujuan yang terlaksana. Secara keseluruhan master plan tahun 1974-1994 terlaksana sangat baik dengan terwujudnya proyek-proyek besar selama masa pembangunan di Kotamadya Palembang.

Kata Kunci : Implementasi, Master Plan, Palembang

ABSTRACT

Master plan 1974-1994 was compiled by an architect in the city of Palembang, Ir. Anwar arifai in 1971 was then head of the Palembang Urban Planning Service to be assigned to the drawing of a master plan. According to the observations and results of the master plan 1974-1994 ninety percent were carried out with various large and concrete projects, one of which was the construction of the ring road, and the civic center. The study USES historical research methods that have source search steps, source criticism, interpretation, and historiography. The purpose of this study is a deeper study of development in the future cities of Palembang to become more defined as well as the material for the institutional assessments involved in building a Palembang. So the purpose of the master plan was used as a tool to promote growth and organize future city planning and expansion. It is an act of strengthening the vision of the next two to three decades given the future population growth, which leads to developing economies, and the need for infrastructure and ecological improvements is expected to occur in certain areas with the development of goals. Throughout the entire master plan of 1974-1994, it was accomplished very well by great projects during the construction of the municipality.

Keywords: Implementation, Master Plan, Palembang

1. PENDAHULUAN

Implementasi sering kali disebut dengan perencanaan yang merupakan proses mempersiapkan suatu kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, akan tetapi perencanaan

juga merupakan kegiatan pengabungan pengetahuan dengan teknik ilmiah di dalam kegiatan organisasi (Agustrian, dkk., 2018). Adanya perencanaan maka akan timbul pelaksanaan yang merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok tertentu agar berkeinginan melakukan suatu usaha pembangunan sesuai sasaran yang telah ditetapkan (Taufiqurokhman, 2008: 2).

Pembangunan perkotaan pada dasarnya ialah suatu proses adanya perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik dalam rentang waktu tertentu, perubahan dapat menyangkut suatu proses yang harus berjalan secara alami bahkan menyangkut proses perubahan dengan adanya campur tangan manusia yang berkewajiban mengatur arah dari perubahan tersebut (Alian, 2013). Untuk dapat mewujudkan efisien pemanfaat ruang tempat berjalannya kegiatan-kegiatan pelayanan pembangunan maka kawasan perkotaan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang (Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

Perkembangan perkotaan modern wilayah Palembang dimulai sejak masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah masa kesultanan tersebut berakhir maka wilayah perkotaan Palembang dilanjutkan oleh Pemerintah Belanda berdasarkan *master plan* yang disusun oleh Thomas Karsten yang merupakan seorang arsitek dan perencana wilayah pemukiman dari Hindia Belanda. Demikian pula perkembangan di Sumatera Selatan sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan internal yang merupakan indikator-indikator ataupun faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan Kota Palembang (Sujiyati, 2015). Berkembangnya pembangunan kota, maka diadakan *team master plan* yang dimaksud sebagai *team* rencana penggunaan tanah yang merupakan landasan bagi program pembangunan kota yang menyangkut segala faktor kehidupan kota. Pada hakikatnya suatu kota yang tumbuh dan berkembang selalu akan dihadapkan pada masalah-masalah eksistensinya (Vargasz, et al., 2019)

Masalah-masalah akan mencakup seluruh kegiatan penduduk kota yang bersifat ekonomis maupun sosial. Demikian pula keadaan fisik merupakan suatu wadah penyesuaian dari semua pergerakan atau intensitas pergerakan kegiatan sosial-ekonomi yang ada dan yang akan tumbuh. Tiga penelitian relevan yang sama pernah diteliti dalam beberapa artikel diantaranya penelitian pertama dilakukan oleh Linda Lazaro Peter da (Peter & Yang, 2019) yang berjudul “*Urban Planning Historical Review of Master Plan And The Way Towards Sustainable City: Dar es Salaam, Tanzania*”. Penelitian ini menghasilkan *master plan* atau rencana induk digunakan sebagai acuan strategi menyeluruh dan saling berhubungan antara aspek satu dan lainnya dalam pengawasan pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kota Dar es Salaam yang merencanakan membangun proyek modern berskala besar untuk menaikkan pemasukan kas negara dan menjamin terwujudnya hunian perkotaan modern.

Penelitian kedua yang berjudul “*Transformation of Urban Heat Island in The Three Center City of Seoul, South Korea: The Role of Master Plans*”. Hasil Penelitian ini adalah *master plan* yang direncanakan pada tahun 1996-2014 oleh Pemerintah Korea Selatan telah menghasilkan peraturan pertumbuhan yang baik dalam mengatur pusat tradisional, kawasan pusat perdagangan serta pertumbuhan kawasan Yeongdeungpoo dan kawasan Gangnam sebagai pusat perdagangan baru yang menghasilkan penambahan gedung, kendaraan, masyarakat dan lapangan pekerjaan baru di dua kawasan baru tersebut. Peningkatan pertumbuhan tersebut juga memberikan dampak baik terhadap lingkungan seiring terus diperbaikinya pusat tradisional di wilayah Seoul (Kim, Jung, & Oh, 2019).

Penelitian ketiga berjudul “*Urban Planning And Popular Participation: A Diagnosis Of The Effectiveness of Participatory Processes Applied to The Revision of São Paulo Master Plan*”. Hasil penelitian ini adalah kota menjadi penyedia pelayanan publik dengan kontrol sosial yang sangat penting untuk menjamin efektivitas setiap kegiatan dan kebutuhan masyarakat kota menjadi penyedia pelayanan publik dengan kontrol sosial yang sangat penting untuk menjamin efektivitas setiap kegiatan dan kebutuhan masyarakat kota. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan penting masyarakat dan negara. Negara sebagai penanggung jawab dan masyarakat memberikan konsoliditas partisipatif atas semua kebijakan dan peraturan dengan ini tingkat keberhasilan *master plan* akan terus menunjukkan kecerahan di masa depan (da Cruz & Marins, 2019).

Pembangunan tidak akan berhasil dan bisa berjalan dengan baik apabila tidak dilakukan dan diproses secepatnya maka dibentuklah team *master plan* yang merupakan penggerak kegiatan pembangunan kota. *Master plan* mampu untuk mengarahkan dan mengatur proses perkembangan yang optimum yang bisa mengkombinasikan aspirasi masyarakat dan potensi daerahnya, manfaat *master plan* dapat mejandi pedoman atau arahan untuk menyusun rencana-rencana tahunannya. Bagi pimpinan daerah, *master plan* merupakan salah satu alat untuk mengkoordinir usulan-usulan kegiatan tahunan dari para jawatan yang ada di bawah wewenangannya.

Sedangkan tugas pemerintah pusat adalah mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari pemerintahan daerah (da Cruz & Marins, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dan terlaksananya *master plan* 1974-1994 terhadap pembangunan di Kota Palembang berdasarkan penyusunan dan penyesuaian seluruh struktur fisik kota atas dasar perlunya desentralisasi dan sentralisasi kegiatan penduduk kota sesuai dengan pola kegiatan penduduknya, penyusunan sistem pergerakan yang lebih efisien, pemberian ruang kegiatan yang cukup untuk menampung kegiatan-kegiatan produktif dengan membedakan tingkat pelayanannya.

2. DATA DAN METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan historis yang mengharuskan peneliti melakukan empat tahap penelitian hingga tersajinya satu penulisan mulai dari heuristik (pencarian sumber-sumber sejarah yang akan kita tulis misalnya menggunakan sumber tertulis berupa buku pedoman, artikel terkait sesuai dengan judul yang dibuat, kritik sumber (kritik seorang peneliti terhadap sumber-sumber sejarah yang diperolehnya), intrepretasi (menganalisis sumber-sumber sejarah yang diperoleh) dan historiografi (penulisan sejarah berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh) (Wasino & Hartatik, 2018: 9). Jenis data didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut ini adalah perolehan data primer dan sekunder dalam penelitian ini:

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

Data Primer	Data Sekunder
Wawancara Sejarawan : <ul style="list-style-type: none"> Anwar Rifai (ketua tim penyusun <i>master plan</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Arsip Peta Wilayah Kota Palembang <i>Master Plan</i> Kota Palembang (1974-1994)



Sumber: Tim Penyusun *Master Plan* 1974-1994 Kotamadya Palembang, 1971
Gambar 1. Peta Kota Palembang

Ruang Lingkup Wilayah Studi

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah wilayah administrasi Kota Palembang yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis Kota Palembang terletak antara $2^{\circ} 52'$ sampai $3^{\circ} 5'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 37'$ sampai $104^{\circ} 52'$ Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2018, berdasarkan SK. Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Bagian Utara, Timur, dan Barat berbatasan : Kabupaten Banyuasin

Bagian Selatan berbatasan : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Muara Enim

Alasan pemilihan Kota Palembang mejadi wilayah studi karena merupakan wilayah yang strategis sebagai pusat pembangunan serta sebagai pusat wilayah perkotaan yang menyimpan banyak nilai-nilai sejarah. Terdapat pertimbangan untuk mengkaji wilayah Kota Palembang yaitu melakukan pertimbangan masa depan yang mana merupakan suatu pertimbangan bagaimana mencapai suatu kondisi yang ideal dimasa yang akan datang terhadap wilayah induk yang akan menjadi sasaran tujuan pembangunan, sehingga disarankan untuk membuat suatu kebijakan utama yang harus disampaikan agar segera dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Master Plan*

Kata Implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implementation* yang mempunyai arti megimplementasikan. Pengertian yang luas tentang implementasi merupakan penerapan atau pelaksana suatu kegiatan yang menimbulkan suatu pengaruh atau konsekuensi berupa peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, pertimbangan peradilan dan kebijakan yang disusun oleh badan-badan pemerintah di dalam susunan organisasi kenegaraan (Lestari dkk., 2020). Secara estimologis, implementasi dapat diartikan sebagai suatu kesibukan yang sangat bersinggungan dengan pemecahaan suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Literatur lain mendeskripsikan pengertian implementasi ialah suatu metode korelasi antara penetapan tujuan dan aktivitas atau kegiatan penerapan tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang sama. Hal ini pada dasarnya merupakan kapabilitas atau kesanggupan untuk mengembangkan jalinan dalam gelang rantai yang disebabkan oleh konsekuensi agar peraturan dapat memberikan hasil (Anggraini, 2020). Sedangkan menurut Febriyanti (2016), implementasi merupakan komponen yang penting dari keutuhan prosedur peraturan. Implementasi dimaksudkan sebagai kunci dari keberhasilan sebuah peraturan karena tanpa adanya implementasi, prosedur peraturan hanya sebuah arsip, dokumen yang tertulis dan tersimpan rapi tanpa kebermanfaatannya.

Meskipun terdapat beberapa definisi mengenai implementasi dalam beberapa literatur mengatakan bahwa pengertian implementasi adalah sama yaitu mengenai penerapan sebuah kebijakan atau peraturan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal infrastruktur dan kebutuhan wilayah perkotaan (Kim, et al., 2019) et al. Implementasi adalah tahap pembuatan kebijakan yang berdampak pada masyarakat yang dipengaruhinya, implementasi biasanya dilakukan setelah pembuatan peraturan maupun dokumen yang telah disepakati untuk kepentingan masyarakat banyak dalam satuan wilayah tingkat terendah sampai tertinggi. Dalam penulisan artikel ini kata implementasi digunakan untuk menelaah dokumen *master plan* atau rencana induk pembangunan Kota Palembang tahun 1974-1994 yang disusun oleh tim *master plan* Kotamadya Palembang, diketuai oleh Kepala Dinas Tata Ruang Kota Palembang tahun 1971, Ir. Anwar Arifai, seorang arsitek pertama di Kota Palembang lulusan Institut Teknologi Bandung. *Master plan* atau rencana induk pembangunan Kota Palembang tahun 1974-1994 merupakan *master plan* pertama yang disusun oleh Kota Palembang setelah resmi menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan implementasi *master plan* dalam pembangunan Kota Palembang berdasarkan dokumen *master plan* Kota Palembang tahun 1974-1994 terdapat beberapa komponen-komponen rencana induk yang telah dituangkan ke dalam master plan, komponen-komponen tersebut ialah; 1) rencana zoning terdiri dari komponen rencana, kebijaksanaan rencana zoning, dan garis besar peruntukkan tanah dan 2) komponen-komponen rencana kota, terdiri dari rencana pusat kota, rencana pengembangan daerah perumahan, rencana daerah industri, jalur hijau rekreasi, fasilitas utilitas, dan jaringan jalan.

Rencana Zoning

a. Komponen Rencana

Rencana zoning dimaksudkan sebagai gambaran keseluruhan daripada perencanaan *land use* kota yang merupakan dasar dari suatu rencana induk kota (*master plan*). Dalam hal ini yang dikemukakan hanya peruntukkan-peruntukkan tanah secara garis besar, yaitu peruntukkan-peruntukkan yang paling dominan dan sesuai dengan konsep yang diinginkan (Karashima & Ohgai, 2019). Berdasarkan pada penilaian tiga alternatif konsep rencana yaitu terhadap 1) kejelasan organisasi ruang atas dasar pembedaan skala fungsi kota yaitu pelayanan kota dan regional, 2) pemanfaatan tingkat aksesibilitas yang tinggi untuk beberapa daerah, 3) penilaian *townscape* yaitu penilaian fungsi kota atas dasar nilai estetika kota dalam rangka pemberian *land mark* sebagai faktor pengenalan fisik kota serta, 4) nilai-nilai "*inducement*" dalam rangka *balance development* antara daerah-daerah yang sudah berkembang dan daerah yang kurang berkembang, maka alternatif konsep rencana pembentukan pusat kota yang berskala regional di seberang Ulu akan merupakan konsep yang dipakai untuk perencanaan-perencanaan selanjutnya.

b. Kebijaksanaan Rencana Zoning

Hasil penilaian perkembangan wilayah di Kota Palembang menunjukkan bahwa perkembangan yang terbesar adalah perkembangan sepanjang jalan Jenderal Sudirman ke sebelah Utara. Untuk mencegah ketidakefisienan daripada penyediaan fasilitas-fasilitas kota, maka pada daerah-daerah pinggiran (sebelah Barat dan Timur Jalan Jenderal Sudirman) tersebut perlu diberikan sub-sub pusat yang akan dapat merupakan daya tarik bagi perkembangan wilayah ke arah itu (sub-sub pusat tersebut) dan juga sub-sub pusat tersebut akan berfungsi melayani wilayah-wilayah di sekitarnya. Pengembangan wilayah atau pemekaran Kota Palembang pada masa yang akan datang dilakukan konsep pemadatan. Konsep pemadatan tersebut akan dilakukan pada daerah Lingkaran I, kemudian setelah dilakukan pemekaran/pengembangan kota ke arah luar daripada daerah Lingkaran I tersebut. Dengan sendirinya dilakukannya pemadatan/optimalisasi *land use* pada daerah dalam Lingkaran I ini akan memberikan konsekuensi sebagai berikut:

- Perlunya menormalisir daerah-daerah rawa dalam Lingkaran I ini, sehingga daerah rawa-rawa tersebut dan penggunaan tanah yang tidak efektif lainnya akan dapat menjadi daerah-daerah fungsional bagi kegiatan-kegiatan kota dengan intensitas penggunaan yang optimal.
- Sistem jaringan jalan, terutama jaringan-jaringan jalan yang berbatasan/sepanjang Sungai Musi (sebelah Utara) yang kini fungsi jalan-jalan tersebut masih rendah perlu dilakukannya peningkatan fungsi daripada jalan-jalan tersebut untuk mempermudah sirkulasi yang terjadi akibat terjadinya peningkatan intensitas *land use* yang dilayani/sector jaringan jalan tersebut.

Berdasarkan kebutuhan penggunaan tanah ternyata tidak semua tanah yang ada di dalam wilayah administrasi Kodya terpakai (Abreek-zubiedat, 2020). Beberapa bagian wilayah yang masih belum tergunakan dan penggunaan lebih lanjut dapat ditentukan setelah jangka waktu dua puluh tahun. Namun secara umum dapat dikemukakan bahwa penggunaan tanah di luar wilayah *project area* (daerah yang efektif digunakan dalam tahun perencanaan) diperkirakan sebagai berikut: adanya kegiatan ekonomi yang baru yang cukup besar di daerah belakang Palembang seperti akan adanya kegiatan-kegiatan produksi batubara, semen dan *rice estate* maka pengembangan fungsi daerah Ulu sebagai pusat transportasi regional dan pusat perdagangan regional akan lebih mantap. Pemusatan elemen-elemen di atas dengan sendirinya akan memberikan rangsangan yang sangat besar bagi pengembangan daerah Ulu.

Fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan di atas akan membutuhkan ruang yang cukup besar di daerah Ulu ini. Fasilitas diatas tidak seluruhnya dapat ditampung sebagai daerah yang bersatu dengan pusat transportasi dan pusat perdagangan tetapi dapat disebar pada daerah lain yang pada dasarnya dapat di tempatkan pada daerah sekitar simpang Jalan A.Yani dan Sudirman serta sekitar simpang Jalan Sudirman depan Jalan Lingar Bayu di daerah Ulu. Tempat-tempat kediaman yang mendukung kegiatan di daerah tersebut akan cenderung menggunakan tempat sepanjang jalan lingkaran baru tersebut. Hal ini di sebabkan daerah sepanjang Jalan A.Yani sudah dikembangkan secara optimal sesuai dengan pengisian *master plan* 1994.

Pengembangan wilayah lain, khususnya wilayah-wilayah permukiman akan terbentuk dan bagian kota seberang Ilir. Wilayah tersebut sesuai dengan keuntungan aksesibilitasnya terletak di daerah barat laut dan daerah timur laut. Sebab ini merupakan wilayah yang akan terlayani oleh pengembangan jalan radial yang ada. Wilayah pengembangan di bagian timur laut sekaligus juga akan memanfaatkan tanah-tanahnya yang masih tersedia terutama di daerah luar dari jalan sampai batang. Sedangkan di daerah barat laut disana masih tersedia tanah yang cukup luas hanya sebagian saja yang dapat terisi sebagai penggunaan tanah yang efektif sebagai akibat daya jangkauan jalan misalnya, sisinya masih merupakan tanah yang dapat digolongkan sebagai tanah kosong atau dapat dipakai untuk penggunaan usaha-usaha kegiatan non-kota.

Tabel 2. Data Garis Besar Peruntukan Tanah Kota Palembang

No	Nama Daerah	Ukuran
1	Daerah Perumahan dan Fasilitas Lingkungan Perumahan	
	• Daerah perumahan	6.5459,6 ha
	• Fasilitas lingkungan perumahan	1.176,0 ha
2	Daerah Pusat Kota	
	• Pusat perdagangan	256,0 ha
	• Civic centre	
	• Pusat pemerintahan <i>local</i>	17,0 ha
	• Pusat pemerintahan regional	68,8 ha
	• <i>Cultural assets</i> , dan lain-lain	149,1 ha
3	Daerah Pelabuhan dan Perdagangan	34,1 ha
4	Daerah Industri	
	• Industri <i>manufacturing</i>	384,78 ha
	• Industri <i>processing</i>	353,1 ha
5	Open Space	
	• Ruang terbuka	125,3 ha
	• Taman kota	2,7 ha
6	Jaringan Jalan	2.830,0 ha
Total		11.856,5 ha

Sumber: *master plan* 1974-1994

Implementasi Master Plan terhadap Pembangunan Kota Palembang

1. Daerah perumahan dan fasilitas-fasilitas lingkungan perumahan

Daerah perumahan akan terbagi menjadi unit-unit tertentu, yang mana dalam batas-batas tertentu unit-unit perubahan tersebut diharapkan akan dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, setiap unit perumahan akan terdapat/dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas lingkungan perumahan guna yang dapat memenuhi kegiatan lingkungan perumahan tersebut, sehingga pada batas-batas tertentu unit-unit perumahan itu akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat merupakan suatu unit unit daerah perancangan yang dapat berdiri sendiri. Tiap - tiap fasilitas lingkungan perumahan tersebut akan mempunyai kapasitas tertentu yang disesuaikan dengan besarnya unit lingkungan dengan perumahan yang harus dilayaninya dan mempunyai lokasi yang cukup *centris* untuk dapat dicapai dari segenap penjuru unit lingkungan perumahan tersebut. Besarnya kapasitas tiap-

tiap fasilitas lingkungan pada tiap-tiap daerah perumahan dapat dilihat pada bab *space* rekrutmen fasilitas-fasilitas lingkungan daerah perumahan. Seluruh daerah perumahan akan dibagi menjadi unit "distrik" setiap distrik terbagi dari menjadi beberapa "sub-district", dan setiap sudut sub. Distrik tersebut dapat dibagi menjadi unit-unit "lingkungan" (*noighbourhood* unit). Dimana pada tiap-tiap unit tersebut dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas lingkungan perumahan yang besaran dan kapasitasnya sesuai dengan unit perumahan yang harus dilayaninya.

Lokasi perumahan di daerah pada prinsipnya terletak di luar dari pusat kota baik perumahan yang berada di sebelah utara maupun selatan Sungai Musi dan perumahan ini mengelilingi pusat Kota Palembang. Akses antar perumahan daerah maupun perumahan di pusat kota dihubungkan oleh sistem jalan raya, fasilitas-fasilitas pendukung juga telah disiapkan seperti ialah pendidikan (STK, SD, SLP, SLA), kesehatan (*hoalt centro*, poliklinik), keagamaan (masjid lokal, langgar, gereja, kelenteng), perdagangan (pasar, toko), rekreasi (lapangan olah raga, taman-taman lokal).

2. Daerah pusat kota

Pusat Kota Palembang akan terdiri atas dua bagian: a) Pusat bagi kegiatan-kegiatan kota (lokal), yang terletak di sebelah utara Sungai Musi, dan b) pusat bagi kegiatan-kegiatan regional, yang terletak di sebelah selatan Sungai Musi. Pusat bagi kegiatan kota (lokal) mempunyai elemen-elemen:

- pusat perdagangan retail (lokal) pusat perdagangan retail terdapat pada daerah sepagang Jalan Jendral Sudirman Sungai Musi sampai dengan batas utara Jalan Kapten A. Rivai. Daerah ini merupakan daerah pemusatan perdagangan berupa kegiatan-kegiatan perdagangan retail yang pada umumnya bersifat kegiatan perdagangan lokal kota sehari-hari, meliputi daerah pertokoan, pasar kebutuhan pokok (sehari-hari), dan lain - lain.
- pusat pemerintahan kota dan bangunan-bangunan umum lainnya. Pemerintahan lokal kota dan bangunan-bangunan umum lainnya terkonsentris pada daerah sekitar benteng dan Masjid Agung kini. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di sini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan erat dengan kegiatan kegiatan pemerintah kota (lokal) Palembang dan kegiatan institusionil kota (Masjid Agung, kantor Pur pusat dan bangunan-bangunan umum kota lainnya). Secara umum daerah ini disediakan sebagai *Civic Center*.

Pemusatan perdagangan *wholesale* (regional) yang berhubungan erat dengan kegiatan kegiatan perdagangan kota sehari-hari, lyalah terletak pada daerah sekitaran sebelah timur di luar daerah 16 Ilir. Dimana daerah ini merupakan daerah pemusatan perdagangan *wholesale* (regional), tetapi sifat dari pada perdagangan *wholesale* di sini sangat erat hubungannya dengan kegiatan perdagangan retail (lokal kota) sehari-hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut lokasi daripada jenis perdagangan ini perlu diletakkan berdekatan/tidak terlalu jauh dengan lokasi pemusatan kegiatan perdagangan retail (lokal kota). Pusat bagi kegiatan-kegiatan regional mempunyai elemen-elemen sebagai berikut:

- pusat perdagangan regional (*wholesale*), yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman sebelah selatan Sungai Musi, Jalan Kedemangan, Jalan Temenggungan dan sebelah utara Jalan Jenderal A.Yani. Kegiatan perdagangan pada daerah ini berupa pemusatan kegiatan kegiatan perdagangan yang bersifat perdagangan *wholesale* (*grossir*), yang mempunyai hubungan erat dengan aktivitas perdagangan regional pada umumnya meliputi pertokoan gosir dan lain-lain.
- pusat pemerintahan regional, yang terletak di sebelah selatan Jalan Jendral A. Yani dan Jalan Ogan titik pada daerah ini merupakan pemusatan kantor-kantor pemerintahan yang mempunyai hubungan erat dengan kegiatan kegiatan regional dan bangunan-bangunan umum (institusionil) yang juga mempunyai hubungan hubungan erat dengan kegiatan kegiatan regional.

3. Daerah Pelabuhan dan Perdagangan

Daerah ini merupakan daerah bagi pemusatan aktivitas perdagangan dan pelabuhan, yang pada prinsipnya lokasi daripada wilayah perdagangan dan pelabuhan ini mempertahankan lokasi daripada Pelabuhan Boom Baru, hanya perlu dilakukan reorganisasi dan perluasan bagi kebutuhan aktivitas-aktivitas tersebut pada masa yang akan datang. Lokasi daripada aktivitas perdagangan dan pelabuhan ini meliputi daerah-daerah sekitar Jalan Titi Boom Baru, Jalan Harapan dan Jalan Blabak. Pemikiran Pelabuhan Boom Baru ini perlu penunangan yang baik dari prasarana transportasi lainnya seperti pengerukan Sungai Musi dan sebagainya. Di dalam *master*

plan dituliskan pembangunan Jembatan Ampera, tetapi dalam kenyataannya pembangunan Ampera merupakan rencana pembangunan dari pemerintah pusat yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat dan presiden. Tetapi rencana pembangunan tersebut termasuk dalam *master plan* pembangunan Kotamadya Palembang.

4. Pemusatan bangunan-bangunan umum

Daerah ini merupakan daerah bagi pemusatan aktivitas-aktivitas bangunan umum (institutionil) yang akan meliputi kegiatan kegiatan perkantoran, perbankan, dan fasilitas-fasilitas umum kota lainnya. Lokasi dari pada pemusatan bangunan-bangunan ini ialah terletak sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan arah ke utara yang dimulai dari Jalan Kapten A. Rivai, kemudian sepanjang Jalan Kapten A. Rivai dengan arah ke barat.

5. Daerah-daerah industri

Dalam pertumbuhan lokasi atau penempatan daripada industri industri bagi Kota Palembang diambil kebijaksanaan bahwa untuk perencanaan industri, maka jenis industri di Kota Palembang dibagi atas dua jenis, ialah:

- a. Industri *manufacturing*; lokasi bagi aktivitas industri *manufacturing* ialah pada daerah sekitar Jalan Pertamina, Jalan Jembatan dan Pusri. Bentuk dari pada industri ini/pada daerah ini merupakan suatu *industrial ostato*.
- b. Industri *prossesing*; Industri-industri *prossesing* akan berlokasi pada daerah: sebelah utara Sungai Musi ialah pada daerah Karanganyar. Sebelah selatan Sungai Musi, ialah pada daerah sepanjang Ogan ke selatan yang dimulai dari daerah Kertapati. Industri minyak Pertamina tetap lokasi pada daerah Plaju seperti halnya kini.

6. Taman kota

Taman kota pusat terletak pada daerah sebelah timur daerah benteng, yang mana taman kota tersebut merupakan "penyekat" antara kegiatan pemerintahan di daerah benteng dengan kegiatan perdagangan lokal (*retail*) di sebelah timurnya. Taman ini akan berfungsi pula sebagai pusat kegiatan kebudayaan *cultural assets*. Rencana pembangunan kota dalam *master plan* 1974-1994. Dalam rancangan tersebut rencananya pembangunan berupa jembatan layang yang akan dibangun mulai dari Kantor walikota ke gedung pemerintahan yang berada di belakang kantor. Pembangunan hotel dan Gedung DPRD yang menghadap ke Sungai Musi (lokasi Restoran River Side Sekarang) juga pembangunan *civic center* (pusat pemerintahan sipil dan militer). Selain Pembangunan dalam kota, di dalam *master plan* juga merencanakan pembangunan jalan lingkar yang dimulai Srimulya-Pulau Kemaro-Plaju-Kertapati-Jembatan Musi 2-Talang Betutu-Jalan Noerdin Panji-Sako (Hanya jalan lingkar Srimulya yang belum terbangun) Jalan Lingkar merupakan jalan yang dibangun untuk mengelilingi kota dan juga digunakan sebagai batas kota. Dalam Infrastruktur pembangunan terminal antar kota yang sebelumnya berada di Kantor DPRD sekarang setelah lahan dibebaskan terjadi penolakan dari masyarakat yang menggunakan terminal karena dinilai sulit diakses. Akibat dari penolakan tersebut, akhirnya pembangunan terminal antar kota dibangun di Kecamatan Karya Jaya dan masih berfungsi sampai sekarang

Hasil penelitian yang kami dapatkan menurut pengamatan dan hasil dilapangan *master plan* 1974-1994 sembilan puluh persen terlaksana dengan berbagai proyek besar dan konkret salah satunya adalah pembangunan jalan lingkar, pembangunan pusat pemerintahan (*civic center*). Berdasarkan data yang kami dapatkan untuk penelitian sebelumnya ada beberapa titik lokasi yang belum terrealisasikan dikarenakan rancangan pembangunan hanya terfokus kepada titik pusat lokasi yang mudah dijangkau saja. Sehingga berdasarkan dokumen *master plan* Kota Palembang tahun 1974-1994 terdapat beberapa komponen-komponen rencana induk yang telah dituangkan ke dalam *master plan*, komponen-komponen tersebut ialah adanya rencana *zoning* terdiri dari komponen rencana, kebijaksanaan rencana *zoning*, dan garis besar peruntukkan tanah. Dengan tujuan dibuatnya *master plan* 1974-1994 yaitu pembangunan rencana induk digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan serta mengatur tata kota dan perluasan kota yang akan datang, serta kebutuhan infrastruktur dan perbaikan ekologi diharapkan terjadi untuk area tertentu dengan adanya susunan tujuan yang terlaksana. Secara keseluruhan *master plan* tahun 1974-1994 terlaksana sangat baik dengan terwujudnya proyek-proyek besar selama masa pembangunan di Kotamadya Palembang. Dengan tujuan dibuatnya penelitian mengenai implementasi *master plan* 1974-1994

agar rencana pembangunan dapat dirancang dan direalisasikan sesuai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga bukan hanya rencana semata saja tetapi berdasarkan bukti nyata yang jelas.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Kota Palembang di tahun 1974-1994 yang direvisi pada tahun 1987 hampir sembilan puluh persen terlaksana dengan baik. Anwar Rifai sebagai ketua tim penyusun *master plan* menjelaskan pembangunan masih terfokus di wilayah pesisir Sungai Musi sebagai daya tarik utama Kota Palembang. Pembangunan yang direncanakan *master plan* mengusung konsep kota internasional yang berbasis pembangunan modern dengan arah pembangunan ke arah utara kota. Pengembangan kota baru membawa dampak meluasnya wilayah kota hampir dua kali lipat dari sebelumnya dari 224 km² menjadi 400,6 km² juga jumlah jiwa yang meningkat dari 2,28% menjadi 3,36%. Wilayah kota baru difokuskan sebagai wilayah perumahan dan pusat perekonomian. Menurut Subadyo (2020) hasil revisi tersebut selanjutnya dikenal sebagai Rencana Induk Kota Palembang 1984-2004. Selanjutnya dengan momentum sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI dan Sea Games 2011 telah menjadi pemicu semangat untuk mengubah wajah Kota Palembang yang dalam dekade tahun 2000 seperti kehilangan roh, karena terbaikannya sejumlah bangunan yang memiliki nilai sejarah. Dalam konteks ini Palembang, kota dengan sejumlah sebutan dan sejarah panjang, seolah lahir kembali.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan; implementasi dalam *master plan* 1974-1994 Kota Palembang dapat dinyatakan hampir terselesaikan dengan baik. *Master plan* 1974-1994 merupakan *master plan* pertama yang dirancang untuk memberikan arahan jelas pembangunan kota. Pembangunan pokok dalam *master plan* 1974-1994 berfokus pada pembangunan jalan lingkar yang digunakan sebagai batas kota pada saat itu juga sebagai pagar kota untuk memudahkan akses dari dan ke kota. Dalam bidang infrastruktur rencana pembangunan *civic center* atau pusat pemerintahan tidak terlaksana sebagaimana yang dibuat dalam *master plan*. Hal ini berkaitan dengan kepentingan juga kesediaan pemerintah dalam hal pembangunan. Tetapi *civic center* masih dapat dilihat yaitu deretan kantor dan dinas pemerintah yang berada tepat di depan kantor walikota. Misalnya kantor Dinas Kesehatan, Dinas Badan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Bappeda) yang direncanakan menjadi zona pusat pemerintahan sipil dan militer. Selain Pembangunan pusat pemerintahan rencana induk 1974-1994 juga terfokus pada pembangunan jalan lingkar yang dibangun dari Srimulya-Pulau Kemaro-Plaju-kertapati-Jembatan Musi 2-Talang Betutu-Sako.

5. REFERENSI

- Abreek-zubiedat, F. (2020). *The right to an urban history: The Gaza Master. 1975–1982.* <https://doi.org/10.1177/0263775820955196>
- Agustrian, dkk. (2018). Managemen Program Life Skill di Rumah Singgah Al-Hafidz Bengkulu. *Jurnal Komoniti Development*, 1(1).
- Alian, M. A. (2013). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Jakabaring. *Jurnal Tekno Global*, 2(1).
- Anggraini, D. (2020). *Implementasi Program Wisata Sungai Di*. 5(3), 16–24.
- da Cruz, R. B. C., & Marins, K. R. de C. (2019). Urban planning and popular participation: A diagnosis of the effectiveness of participatory processes applied to the revision of São Paulo master plan. *Habitat International*, 88(April), 101987. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.05.006>
- Febriyanti, D. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TKI PADA TAHAP PRA PENEMPATAN (Studi Kasus TKI Kota Palembang)*. 1(2).
- Karashima, K., & Ohgai, A. (2019). Implementation issues of the planning support tool in Japan: Focusing on urban disaster mitigation. *Frontiers of Architectural Research*, 8(4), 483–497. <https://doi.org/10.1016/j.foar.2019.07.002>
- Kim, H., Jung, Y., & Oh, J. I. (2019). Transformation of urban heat island in the three-center city of Seoul, South Korea: The role of master plans. *Land Use Policy*, 86(August 2018), 328–338. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.016>

- Lestari, D. Y., Kusnandar, I., Muhafidin, D., Studi, P., Ilmu, M., Negara, A., & Tinggi, S. (2020). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*. 7, 180–193.
Palembang Dalam Angka 2020. (2020). Badan Pusat Statistik Kota Palembang.
- Peter, L. L., & Yang, Y. (2019). Urban planning historical review of master plans and the way towards a sustainable city: Dar es Salaam, Tanzania. *Frontiers of Architectural Research*, 8(3), 359–377.
<https://doi.org/10.1016/j.foar.2019.01.008>
- Subadyo, Tutut. 2020. Optimasi Potensi Artefak Budaya Pada Koridor Sungai Musi Untuk Pengembangan Wisata Sejarah di Kota Palembang. *Jurnal Arsitektur Universitas Malang*
- Sujiyati, M. N. H. A. (2015). Pembangunan Kota Palembang Dengan Konsep Tata Ruang Kota Hijau Pada Masa Hindia-Belanda. *Jurnal Tamaddun*, XV(1).
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Tim Penyusun Master Plan Kota Palembang. (1971). *Master Plan 1974-1994 Kotamadya Palembang*. Palembang: Pemerintah Kotamadya Palembang.
- Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*.
- Vargasz, Valeria Ruiz, Rebecca Lawthom, Alicia Prowse, Sally Randles, K. T. (2019). Implications of Vertical Policy Intergration for sustainable development implementation in higher education institutions. *Journal of Cleaner Production*.
- Wasino. (2018). *Metode penelitian sejarah dari riset hingga penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.